

## KERJA LAYAK DORONG PERKEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DI KEDONGANAN DAN JIMBARAN BALI

*Bambang Suharto*

Jurusan Pariwisata Fakultas Sastra dan Budaya  
Universitas Negeri Gorontalo  
Email:bamria03@gmail.com

*Janianton Damanik*

Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada

*Muhammad Baiquni*

Program Studi Kajian Pariwisata  
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

*Chafied Fandeli*

Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta

### ABSTRACT

The decent work has become an obligatory in the tourism industry. This work has been able to ensure properly the needs of workers, families, and their social life, productive and prosperous. This research focuses on the study of generated effects of the decent work. Theoretical framework of the ILO decent work (2009a) was used as the guidance framework to answer and find the actual implementation in the tourism industry. The study used quantitative method as the basis of analysis towards the data which were collected through questionnaires. The result indicated that the effect of the decent work on the development of tourism industry reached 68%. This result was in good enough category scale. In the scope of this value, the decent work showed the empirical reality gave further effect towards the tourism forms based on prosperity and sustainability.

**Keywords:** *The decent work; Tourism industry; Prosperity.*

### ABSTRAK

Kerja layak telah menjadi kebutuhan dalam industri pariwisata. Kerja ini telah mampu menjamin kebutuhan diri pekerja, keluarga, dan kehidupan sosialnya secara layak, produktif, dan sejahtera. Penelitian ini mengambil fokus kajian pada efek kerja layak yang ditimbulkan. Kerangka teori kerja layak ILO (2009a) digunakan sebagai kerangka pedoman dalam menjawab dan menemukan implementasi senyatanya dalam industri pariwisata. Metode kuantitatif digunakan sebagai pijakan analisis terhadap data yang dikumpulkan melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan efek kerja layak terhadap perkembangan industri pariwisata sebesar 68%. Hasil ini ada pada skala kategori cukup baik. Dalam lingkup nilai ini, kerja layak menampakkan realitas empiriknya memberikan efek lanjut terhadap bentuk pariwisata berbasis kesejahteraan dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Kerja layak; Industri pariwisata; Kesejahteraan.*

## PENGANTAR

Gaji yang mengacu pada kebutuhan hidup layak beberapa pekerja versus pengusaha di industri pariwisata masih banyak diwarnai permasalahan. Bahkan, usaha untuk memperjuangkan permasalahan ini dilakukan oleh pekerja melalui demo hingga tindakan anarkitis. Beberapa peneliti sebelumnya di Bali juga masih menyimpulkan hal yang sama dengan temuan-temuan UNWTO (2009) bahwa perkembangan industri pariwisata yang tumbuh dinamis di Bali cenderung kurang berefek terhadap kesejahteraan pekerjanya (Mumi, 2005; Cukier dan Wall, 1995). Beberapa pekerja masih berupah di bawah UMR, jam kerja lebih dari 45 jam perminggu, PHK sepihak, jaminan sosial rendah, tenaga alih daya menguat, serikat pekerja dianggap ancaman pengusaha, stereotip dan disparitas pekerja laki-laki dan perempuan tinggi, maraknya pekerja anak, polarisasi majikan versus pekerja menguat. Keseluruhan kenyataan ini merupakan bukti argumentasi, prinsip, dan klaim-klaim para peneliti sebelumnya yang menyatakan kerja layak merupakan pusat kesejahteraan bermasalah (ILO, 2009a; UUD 1945; Chen, dkk., 2004).

Padahal, realitas kerja layak di industri pariwisata lebih spesifik yang berbeda dengan industri-industri lain, seperti pabrik-an, perkebunan atau pertambangan. Kerja layak di industri pariwisata bertumpu pada jasa, profesional, berjejaring global dengan segmen pasar yang luas yang lebih mampu mengatasi krisis, mengoptimalkan aspek *tangible* dan *intangible*. Kerja layak di industri pariwisata berorientasi pada visi misi bukan bertumpu pada majikan atau atasannya, mengoptimalkan sistem dan instrumen kerja, teknologi, kreativitas, dan perilaku pekerja untuk mendatangkan keuntungan bisnisnya. Keseluruhan realitas seperti ini diasumsikan ada ambiguitas dalam perkembangan industri pariwisata Bali (Damanik, 2013; Dale, 2013). Kerja layak dalam perkembangan industri pariwisata seperti ini masih menyisakan banyak pertanyaan.

Pariwisata yang tergolong industri modern yang memiliki efek hubungan kerja terhadap perkembangan industri pariwisata yang kurang saling menguntungkan seperti itu, tentu saja disayangkan. Oleh karena itu, pentingnya riset ini dilakukan untuk menganalisis, sekaligus mengkritisi efek praktik kerja layak ILO dalam perkembangan industri pariwisata di Bali tersebut.

Riset yang dilakukan ini menggunakan pendekatan paradigma materialisme historis dengan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan dari 1 Maret - 31 Agustus 2014 di Desa Jimbaran-Kedonganan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Lokasi riset ditetapkan secara *purposive* dengan dasar pertimbangan sebagai berikut: (1) Industri pariwisata banyak ditumbuhkembangkan di lokasi ini; (2) Di wilayah ini telah tumbuh beragam usaha dalam skala lokal, nasional, dan internasional. (3) Ada perbedaan di kedua desa ini yang bisa diperbandingkan, yaitu di lokasi Kedonganan menunjukkan bahwa peran desa adat atau pemerintah desa sangat dominan dalam pengelolaan pariwisata. Masyarakat lokal telah mampu memosisikan diri sebagai aktor pariwisata. Industri pariwisata kebanyakan sektor informal. Berbeda dengan di lokasi Jimbaran, peran pemerintah dan investor lebih dominan dalam pengelolaan pariwisatanya, sehingga cenderung terjadi praktik marginalisasi terhadap masyarakat lokal. Industri pariwisata kebanyakan sektor formal; (4) Karakteristik pekerja di industri pariwisata di kedua daerah ini sangat heterogen, yaitu berasal dari berbagai daerah, bahkan banyak pekerja dari warga negara asing.

Di kedua lokasi ini, survai menggunakan alat kuesioner telah dilakukan terhadap sampel pekerja sebanyak 789 responden. Teknik pengambilan sampel melalui rumus Slovin dilakukan dengan *stratified random sampling* dari populasi 8.641 pekerja di 528 industri dalam sembilan jenis usaha industri pariwisata yang berbeda, dengan ketentuan pekerja telah melewati masa percobaan, menerima gaji, dan ber-KTP Kedonganan-

Jimbaran (lihat Anker, 2002). Selain itu, sebaran distribusi sampel juga mempertimbangkan terwakilinya kesempatan yang sama terhadap setiap pekerja secara proporsional di semua jenis usaha industri pariwisata tersebut. Di lapangan peneliti dibantu oleh 10 enumerator untuk mendistribusikan dan mengumpulkan hasil kuesioner. Selanjutnya, data disortir dan data yang memenuhi syarat validitas dan reliabilitas diolah. Data kuantitatif parametrik dari hasil olahan program *software* SPSS 19 tersebut dianalisis. Hasil analisis berupa temuan induktif disajikan dalam bentuk kuantitatif deskriptif.

## PEMBAHASAN

Untuk menguji, menganalisis, dan mengkritisi konsep prinsip praktik kerja layak ILO yang mampu mendorong perkembangan industri pariwisata Bali yang menyejahterakan pekerja ini perlu diuji.

### Uji Hipotesis Efek Kerja Layak

Adanya efek variabel-variabel yang diprediksikan akan menjadi penjelas yang signifikan terhadap kerja layak harus teruji

baik secara simultan maupun parsial. Berikut ini adalah penjelasannya.

### Efek Kerja Layak Secara Simultan

Hasil uji hipotesis statistik secara simultan menunjukkan bahwa F-hitung sebesar  $15,318 > F\text{-tabel } 2,383$  atau berdasarkan uji signifikansi nilai probabilitas dalam regresi linear berganda sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka hipotesis  $H_0$  yang diujikan ini ditolak dan hipotesis alternatif  $H_a$  diterima. Artinya, model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi kerja layak atau dapat dikatakan bahwa variabel-variabel independen kerja layak secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Jadi, hipotesis pertama teruji, yaitu semakin tinggi kesempatan kerja penuh dan produktif, pemenuhan hak-hak pekerja, perlindungan terhadap jaminan sosial, dan peran aktif pekerja dalam dialog sosial secara simultan, semakin tinggi potensinya terhadap perkembangan industri pariwisata yang menyejahterakan pekerja di Kedonganan-Jimbaran Bali. Sumbangan efek kerja layak 68% secara simultan dari variabel yang diujikan terlihat pada tabel 1.

Tabel 1 Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.849 <sup>a</sup>	.720	.680	.77094920	.720	15.318	4	784	.000	.145

- a. Predictors: (Constant), Kesempatan Kerja Penuh dan Produktif (X1), Pemenuhan Hak-hak ditempat Kerja (X2), Jaminan Sosial (X3), dan Peran Dialog Sosial (X4).  
 b. Dependent Variable: Perkembangan Industri Pariwisata (Y)

### Efek Kerja Layak Secara Parsial

Nilai statistik t-hitung variabel secara parsial (3,787; 2,810; 2,792; 2,947) lebih besar dari t-tabel (2,776) atau nilai koefisien regresi variabel  $\rho$  secara parsial (0,009, 0,004,

0,000, 0,017)  $< 0,05$ , sehingga hipotesis  $H_0$  ditolak dan hipotesis alternatif  $H_a$  diterima. Besarnya nilai statistik t-hitung, signifikansi, koefisien persamaan, dan koefisien regresi terlihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.		
					B	Std. Error
1	(Constant)	644.430	45.825		14.063	.000
	X1	.178	.047	.650	3.787	.009
	X2	.104	.037	.551	2.810	.004
	X3	.067	.024	.513	2.792	.000
	X4	.056	.019	.501	2,947	.017

- a. Dependent Variable: Y

Melihat kondisi uji statistik seperti itu menunjukkan bahwa hipotesis kedua teruji, yaitu *Pertama*, semakin banyak kesempatan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan penuh dan produktif, semakin nyata peluang berkembangnya industri pariwisata yang menyejahterakan tersebut; *Kedua*, semakin terpenuhi hak-hak pekerja, semakin terpenuhi juga syarat suatu industri pariwisata dikatakan berkembang dan menyejahterakan; *Ketiga*, semakin tinggi perlindungan jaminan sosial yang didapatkan oleh seorang pekerja, semakin terjamin syarat terpenuhinya perkembangan industri pariwisata yang menyejahterakan; *Keempat*, semakin aktif peran pekerja dalam dialog sosial, semakin tinggi tingkat perkembangan industri pariwisata yang menyejahterakan tersebut.

### **Potensi Efek Variabel-Variabel Kerja Layak**

Potensi dari variabel-variabel kerja layak ini bila dilakukan dengan baik mampu berefek terhadap perkembangan industri pariwisata yang menyejahterakan.

### **Besaran Efek Epsilon (32%)**

Sekitar ada 32% dari efek global kerja layak ( $100\% - 68\% = 32\%$ ) dalam penelitian ini tidak terungkap oleh variabel independen atau biasanya disebut epsilon, meskipun telah dirumuskan dengan pertimbangan variabel yang telah diterapkan oleh beberapa peneliti sebelumnya (Chen, dkk., 2004; Batero, 2004; Anker, dkk., 2003; Standing, 2002; ILO, 2002a; 1999). Hal ini karena variabel-variabel efek kerja layak di industri pariwisata tersebut sangat kompleks dengan budaya yang bervariasi di tempat yang berbeda-beda.

Kemungkinan efek kerja layak tidak terungkap oleh variabel independen karena para pekerja cenderung kurang memahami bahwa praktik-praktik yang selama ini dianggap lazim ternyata berefek pada semakin kuatnya tindakan-tindakan eksploitatif. Para pekerja tidak waspada bahwa wacana stigmatisasi yang faktanya tidak seperti itu sama saja berefek buruknya dengan tindakan eksploitatif (Anker, dkk., 2003). Bila ada perempuan bekerja di dapur, itu

suatu kebetulan yang juga tidak menutup kemungkinan laki-laki dan mereka diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Terlepas dari itu semua, peneliti telah mengukur indikator diskriminasi gender dalam variabel pemenuhan hak-hak pekerja. Akan tetapi, tidak mengukur efek dari pemberitaan stigmatisasi, sehingga masih ada 32% kerja layak yang diterangkan oleh sebab-sebab yang lain, seperti itu di luar variabel yang menghasilkan 68% tersebut.

### **Besaran Efek Model Regresi (68%)**

Sumbangan besaran efek dari kedua hubungan kausalitas ini dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,680 atau 68%. Artinya bahwa nilai 68% variabilitas kerja layak dapat dijelaskan oleh semua variabel tersebut. Berikut adalah penjelasan efek variabel-variabel kerja layak tersebut.

### **Efek Kesempatan Kerja Penuh dan Produktif**

Berdasarkan efek praktik kerja layak 68% tersebut di antaranya ditunjukkan oleh kemampuan menyerap pekerja di berbagai jenis usaha di industri pariwisata yang terhitung cepat dengan masa jeda menganggur rata-rata kurang dari tiga bulan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya lowongan pekerjaan karena perkembangan industri pariwisata di Kedonganan-Jimbaran bersifat lebih terbuka dari pada industri pabrikaan, perkebunan, pertambangan, atau industri yang lain, seperti terbuka untuk semua sektor formal-informal, semua skala usaha, jenis pekerjaan, dan siapapun kepemilikannya. Pekerjaan di industri pariwisata terbuka untuk semua pekerja dari semua umur, semua asal daerah, semua status perkawinan, semua agama, terampil-nonterampil, dan berpendidikan-nonpendidikan. Dominasi industri pariwisata terhadap industri yang lain tersebut di antaranya juga membuat pekerja dan pengusaha lebih mudah menyesuaikan, termasuk dalam proses *learning by doing*, sehingga kemauanlah yang menjadi unsur penting dari kemajuan.

Walaupun penyerapan pekerja bersifat terbuka, tetapi tetap diimbangi dengan produktivitas yang tinggi (84,4%). Tingginya tingkat produktivitas ini juga tidak terlepas dari kepatuhan terhadap sistem dan fungsi instrumen kerja (77,9%), seperti kesepakatan kerja bersama, *job description*, *standar operating procedure*, *policy and procedure*, *check list*, *job breakdown*, dan lain-lain. Ketika kesempatan kerja lebih tinggi dari pada angkatan kerja, maka posisi tawar pekerja atas kualitas pekerjaan akan semakin tinggi. Kualitas pekerjaan yang mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pekerja juga meningkatkan produktivitas pekerja. Semakin banyak pekerja mendapatkan kesempatan kerja penuh dan produktif seperti itu, semakin nyata peluang berkembangnya industri pariwisata tersebut.

Sementara itu, maraknya kesempatan kerja penuh dan produktif karena efek dari sirkulasi kapital, kebutuhan teknologi, dan kebutuhan pasar yang lebih spesifik membuat organisasi pekerja semakin terus berkembang dinamis ke arah yang terbuka. Berbagai jenis pekerjaan dalam usaha ekonomi skala kecil, menengah sampai besar, semuanya tumbuh ke arah itu dengan tingkat kompleksitas, dan spesialisasi yang beragam. Struktur kelas pekerja yang sangat kompleks dan beragam membuka peluang bagi para pekerja profesional berpindah-pindah kerja. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa di industri pariwisata telah terbentuk *protean career*, yaitu karir yang mengalami perubahan karena aspek kebutuhan keprofesionalan pekerja, seiring dengan kebutuhan perubahan di lingkungan kerja (Noe, dkk., 2000). Pekerja dan pengusaha menyadari pentingnya hal ini.

Efek dari praktik kerja layak 68% tersebut juga terlihat dari profesionalisme pekerja di industri pariwisata yang cenderung fokus secara berurutan terdiri dari ASK, yaitu *attitude*, *skill*, dan *knowledge*. Tamu yang dilayani dengan perilaku yang baik, seperti pentingnya bekerja dengan senyum yang ikhlas meskipun tidak terampil dan tidak ber-IQ tinggi akan lebih membahagiakannya.

Tamu cenderung lebih senang bila dilayani oleh pekerja yang bekerja dengan perilaku yang baik murah senyum, di tambah lagi pekerja itu terampil. Begitu juga tamu cenderung sangat senang bila dilayani oleh pekerja yang bekerja dengan perilaku baik murah senyum, berketerampilan tinggi, dan memiliki wawasan yang luas. Artinya, ketiga unsur-unsur pembentuk profesionalisme itu penting. Pada industri pariwisata unsur *attitude* jauh lebih penting dari pada kedua unsur yang lain, bila dibandingkan di industri pertambangan, perkebunan, atau pabrikaan. Kondisi ini membuat industri pariwisata lebih mudah diterima oleh semua angkatan kerja.

Kondisi efek 68% ini juga terlihat dari angkatan kerja yang lebih beragam dan mencakup lebih banyak orang kulit berwarna, wanita, dan imigran baru dengan kebutuhan khusus. Misalnya, *expatriat* asal Jepang berfungsi untuk kebutuhan membidik pasar Jepang karena mereka lebih percaya, lebih mudah berkomunikasi, lebih memahami, dan tahu seluk beluk budayanya untuk menangkap segmen ini (Usi, 2009). Begitu juga *expatriat* dari negara yang lain, di antaranya Itali, Greece, dan Taiwan. Inilah tantangan terbesar pekerja industri pariwisata sekarang ini.

Keluar masuknya pekerja atau *turn over* yang tinggi 15% pertahun dari pada Thailand 14% dan China 12% (Disnakertrans, 2012) dengan alasan pengembangan karir, penghargaan, jabatan yang lebih tinggi dan atau gaji yang lebih baik. Keluar masuknya pekerja sudah menjadi hal yang lazim. Keluar masuknya pekerja tidak terbatas pada area kerja di Bali dan sekitarnya, tetapi lintas batas antarnegara. Pengusaha saling berkompetisi untuk mendapatkan pekerja terbaiknya karena harus berkompetisi dengan yang lain. Di kala pengusaha di industri pariwisata tersebut tidak mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pekerja tersebut, maka akan ditinggalkannya. Tren ini juga diikuti oleh semakin banyaknya muncul manajer-manajer dan pengusaha-pengusaha baru dari kalangan muda-mudi di usaha industri pariwisata ini.

Kenyataan ini menggambarkan akibat maraknya kesempatan kerja penuh dan produktif di berbagai jenis usaha industri pariwisata yang terbentuk sudah tidak dapat dideterminasi secara tunggal oleh kelompok besar, kapitalis (1,5%) dan proletariat (44%). Struktur kelas pekerja dalam industri pariwisata ini terfragmented ke dalam kelompok-kelompok pekerja yang profesional (54,5%) baik ditinjau dari aspek permodalan, spesifikasi ketrampilan dan keahlian, maupun kemandirian dan kewirausahaan. Profesionalisme ini, juga banyak melahirkan identitas ganda dari para pekerja yang menjadikannya tidak mutlak disebut sebagai pekerja. Selain menjadi pekerja, mereka menjadi pengusaha mandiri (35,4%). Mereka berhasil memobilisasi diri menjadi pengusaha pinggiran sampai pengusaha utama. Akhirnya, gerak simultan struktur kelas di lapangan pekerjaan di berbagai jenis usaha industri pariwisata dengan implikasi yang dilahirkannya ini, menentukan efek kerja layaknya.

### **Efek Pemenuhan Hak-Hak Pekerja**

Bila kita cermati hak-hak pekerja ini, meskipun kecenderungan industri masih lebih mengutamakan hak-hak pekerja terkait dengan hukum, baru kemudian hak-hak pekerja yang berhubungan dengan masalah-masalah produktivitas atau ekonomi, hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan dan kebahagiaan pekerja pun juga tidak diabaikan, seperti gaji di atas UMK 69,5%, diberikan hak cuti 93,6%, mendapatkan THR 91%, dan mempraktikkan standar K3 55,2%. Akan tetapi, tidak semua seperti itu terutama untuk usaha-usaha pinggiran. Hal-hal yang sering terjadi pada usaha-usaha pinggiran adalah tindakan pelecehan seksual melalui lisan. Kondisi ini dipengaruhi euforia lingkungan dengan perbedaan budaya sering berbeda pemahamannya. Bagi mereka hal seperti itu dianggapnya biasa saja, bukan pelecehan, keakraban dengan caranya. Bagi pandangan orang lain yang berbeda budaya dan belum memahami kebiasaan-kebiasaan mereka, berpendapat lain.

Hal lain ditemukan juga pada fakta empiris, meskipun dalam Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) telah diatur larangan kerja shift malam berturut-turut, ada juga (2,9%) beberapa pekerja melanggarnya. Kondisi seperti itu atas dasar kemauan pekerja, misalnya dikala rangkap jabatan di tempat kerja lain atau bisnis pribadinya bersamaan pada saat jam kerja, sekolah sambil bekerja, atau keperluan-keperluan pribadi pekerja lainnya. Keadaan seperti itu, pimpinan pun terkadang mengizinkannya dengan alasan kemanusiaan dan yang penting operasional kerja, tetap berjalan baik secara optimal.

Pimpinan juga sering menghimbau untuk bekerja secara profesional dengan datang dan pulang tepat waktu (82,8%), jika tidak, industri harus membayar lebih mahal untuk hitungan lembur dan tidak mendapatkan pekerja dalam kondisi ceria untuk melakukan pelayanan prima. Loyalitas dan tanggung jawab terhadap pekerja yang tinggi, mereka melakukan seperti itu. Mereka menikmati pekerjaan dan bangga dengan itu. Lingkungan kerja yang menyenangkan membuat mereka lupa waktu pulang. Inilah kenyataan beberapa pekerja di industri pariwisata yang kontraproduktif dengan pernyataan Marx (2006) bahwa pekerja merasa tidak nyaman dan resah ketika bekerja dan sebaliknya merasa nyaman ketika tidak bekerja. Kelebihan waktu kerja biasanya cenderung dilakukan oleh para pimpinan karena ukuran prestasi kerjanya didasarkan pada tanggung jawab hasil dengan imbalan insentif bukan jam kerja seperti layaknya pekerja bawah.

Hasil pengamatan 2013 menunjukkan bahwa penyerapan pekerja di berbagai jenis usaha industri pariwisata di Kedonganan-Jimbaran tidak ada yang saling mendominasi. Perbandingan jenis kelamin sangat proporsional, yaitu laki-laki sebesar 51,0% dan perempuan 49%. Penjaga keamanan bagian depan yang distigmatisasikan adalah laki-laki gagah, cewek pun ada. Begitu juga juru masak di bagian belakang yang distereotipkan untuk layaknya pekerja perempuan yang kurang penting, laki-laki pun ada. Sudah tidak ada lagi persepsi melekat kurang penting, murahan, dan nakal bagi perempuan yang bekerja di hotel, diskotik, bilyard, atau hiburan lainnya.

Stigmatisasi pekerja tidak terampil, susah dilatih, dan banyak libur, serta cenderung digunakan sebagai penarik bisnis pariwisata sudah tidak diidentikan lagi dengan sosok pekerja perempuan. Perempuan berkulit hitam sudah tidak lagi direpresentasikan sebagai pekerja rendahan yang minim keterampilan. Begitu juga perempuan berjilbab juga sudah tidak lagi direpresentasikan seolah-olah ribet dan ekstrim terkait aliran tertentu. Budaya patriarki kaum perempuan sudah tidak distigmatisasikan sebagai *subordinate*. Mereka juga mempunyai kesempatan yang sama untuk berprestasi di berbagai jenis usaha industri pariwisata (Austin, 1991). Keberagaman inilah yang saling menggantikan, sehingga operasional tetap berjalan optimal di kala beberapa dari komunitas gender atau agama tidak masuk kerja terkait kepentingannya, seperti Hari Raya Keagamaan.

Pekerja di berbagai jenis usaha di industri pariwisata Kedonganan-Jimbaran yang melebihi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung 2013 sebanyak 69,5%. Kondisi pendapatan mereka ini rata-rata sudah cukup baik, meskipun masih menyisakan 31,5% pendapatan yang masih di bawah standar UMK. Upah minimum ini belum ditambah dengan uang *social capital* (kapital gotong royong) dalam kapitalis atau lebih dikenal dengan sebutan uang *service* yang besarnya biasanya lebih besar dari gaji pokoknya atau UMK tersebut, tergantung pendapatan industri. Potensi efek pemenuhan hak-hak pekerja dari unsur gaji ini merupakan hal yang penting untuk meningkatkan daya beli yang mendorong perkembangan industri pariwisata. Hal ini juga terlihat dari gaya hidup konsumtif mereka di akhir bulan saat gajian. Mereka belanja ke mall-mall memborong kebutuhan-

kebutuhannya yang bisa memperlihatkan status mereka bekerja di mana.

Selain gaji pokok (UMR), pekerja juga menerima uang *service*. Ketentuan besarnya uang *service* adalah 10% dari semua keuntungan transaksi di setiap proses produksi. Jumlah persentase ini kemudian didistribusikan untuk pengembangan sumberdaya pekerja sebesar 2%, penggantian kerugian atas barang hilang dan rusak sebesar 3%, dan sisanya sebesar 5% dibagikan setiap bulan secara merata ke semua pekerja. Apabila terdapat anggaran sisa dari 2% untuk pengembangan SDM dan ada sisa dari 3% untuk anggaran ganti rugi kehilangan atau kerusakan, maka sisa tersebut diakumulasikan lagi dan dibagi merata ke pekerja di setiap akhir tahun. Semua pembagian pendapatan tersebut, tidak tergantung pada sistem poin atau pangkat/ jabatan, tetapi dibagi merata kepada semua pekerja (KKB Hotel Four Season, 2013).

Berdasarkan hasil pengamatan 2013 menunjukkan bahwa tidak terlihat perlakuan diskriminasi antara sektor informal dengan sektor formal. Justru, kondisi semacam ini dijadikan pijakan oleh kebijakan Pemerintah Daerah Adat Kedonganan-Jimbaran untuk menata sektor informal pedagang pantai di daerah ini. Tidak hanya itu, BPD dan BUMN pun banyak membantu permodalan mereka yang di sektor informal ini. Dominasi usaha industri pariwisata di antara usaha-usaha industri yang lain justru mendorong beberapa usaha industri pariwisata di sektor informal meraup untung jauh lebih tinggi. Perbedaan harga barang-barang yang dijual ke wisatawan sangat tinggi di bandingkan dengan usaha yang sama di lokasi yang tidak didominasi oleh usaha industri pariwisata, terlepas dari tingginya kebutuhan hidup di daerah wisata tersebut.

Tabel 3  
Perbandingan Harga di Daerah Dominasi Industri Pariwisata dengan yang Lain

Item	Dominasi Usaha Pariwisata		Nondominasi usaha pariwisata
	Hotel	Pinggir Pantai	Denpasar
Jasa pijat per jam	1.000.000	300.000	50.000
Kelapa muda	75.000	15.000	5.000
Aqua 600 ml	15.000	10.000	2.000
Jagung Bakar	20.000	10.000	2.000

Sumber : data primer 2013.

Hal ini berbeda dengan pendapat Hill (2001) dan Kantor, dkk., (2006) yang menganggapnya usaha sektor informal di industri pariwisata ini kurang penting, ilegal, dan seolah-olah ada unsur kriminal. Hal semacam ini justru memarginalkan usaha kreatif warga, dan mendiskreditkan pekerja lokal karena lokus dari penelitian pariwisatanya merupakan bagian kecil dari industri yang lain.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa ada sekitar 3,1% anak di bawah umur 18 tahun bekerja di beberapa jenis usaha hiburan selama 2-4 jam, 2 kali seminggu sepulang sekolah. Hal yang kontraproduktif dengan kekuatiran ILO bahwa pekerja anak mengakibatkan penurunan kemampuan pada generasi selanjutnya, justru mereka yang di Bali memandangnya sebagai anak yang berprestasi, beradab, dan beradab dari sederetan pengalamannya belajar bekerja tersebut (Dev dan Mahajan, 2003). Hal ini merupakan bagian dari perilaku darma dan menunjukkan jati dirinya. Sebagian dari mereka justru dapat membiayai sekolah di kala orang tua atau negara tidak hadir sebagaimana diharapkan. Peneliti meyakini sekaligus kritik terhadap ILO bahwa pelarangan pekerja anak bukanlah penyelesaian untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap anak. Pelarangan pekerja anak diduga ketakutan dunia barat terkait dengan daya saing pekerja ke depan yang melihat kenyataan anak-anak di dunia ke tiga gigih bekerja sambil belajar mampu berkontribusi terhadap kemajuan pariwisata. Hak pekerja anak di industri pariwisata sangat diperhatikan secara proporsional. Pekerja anak di industri pariwisata Bali berbeda dengan pekerja anak di industri pabrikaan, pertambangan, atau perkebunan di Brazil, Thailand, dan Vietnam yang rata-rata mereka putus sekolah dan dipekerjakan penuh waktu dengan beban yang tinggi dalam kondisi yang memprihatinkan.

### **Efek Perlindungan Jaminan Sosial**

Kompensasi pekerja untuk mendapatkan penggantian di antaranya biaya perawatan sakit atau cacat karena kecelakaan kerja

atau menderita sakit akibat hubungan kerja cukup baik. Bukti ini di antaranya terlihat dari indikator keikutsertaan pekerja dalam perlindungan jaminan sosial sebesar 57,7%. Akan tetapi, khususnya daerah yang didominasi oleh berbagai usaha industri pariwisata menunjukkan bahwa belum optimalnya hingga 100% keikutsertaan pekerja dalam program perlindungan jaminan sosial ini ditengarai akibat lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran pengusaha dan pekerja, lemahnya posisi tawar pekerja terhadap pengusaha. Selain itu, makin sulitnya mengorganisir banyaknya pekerja di berbagai jenis usaha pinggir di industri pariwisata untuk ikut bergabung dalam program jaminan sosial ini. Hal ini berbeda dengan daerah-daerah lain yang tidak didominasi oleh usaha-usaha di industri pariwisata, terlihat rendahnya keikutsertaan perlindungan jaminan sosial karena tingginya pengangguran yang tidak berpenghasilan, rendahnya kualitas pekerja, dan upah murah sehingga berimplikasi terhadap sulitnya pembayaran iuran program tersebut.

Hal ini juga diperparah oleh pendekatan *demand based*. Pelayanan pemerintah yang minimal karena persepsi pemerintah bukan kewajiban pemerintah untuk melayani secara aktif hak pekerja, tetapi pekerja yang membutuhkannya. Selain itu, ribetnya klaim kompensasi dan pelayanan di rumah sakit yang masih kurang profesional sering menjadi keengganan pekerja mengikuti program ini. Akan tetapi, tidak semua seperti itu, begitulah kondisi efek perlindungan jaminan sosial yang kontribusinya juga masih kuat terhadap perkembangan industri pariwisata ini. Nilai 68% ini juga menunjukkan sumbangan besar efek unsur jaminan sosial kerja layak yang ada. Semakin baik perlindungan jaminan sosial yang didapatkan oleh seorang pekerja, semakin terjamin syarat terpenuhinya perkembangan industri pariwisata.

### **Efek Peran Aktif Pekerja dalam Dialog Sosial**

Hampir semua jenis usaha di industri pariwisata memperlihatkan kondisi peran



dialog sosial yang sangat lemah (39,4%). Hal ini dipengaruhi oleh indikator minimnya keberadaan serikat pekerja di berbagai jenis usaha di industri pariwisata. Berserikat masih dipandang sebagai ancaman bagi industri. Beberapa pengusaha tidak menghendaki keberadaan serikat pekerja dengan mengatakan *take it or leave it* pekerjaan itu di kala pekerja menuntutnya. Akibatnya, kebutuhan berserikat di kalangan masyarakat masih rendah dan kesadaran industri pariwisata lemah dalam memberikan penguatan terhadap kebebasan berserikat bagi para pekerja. Ada anggapan bahwa urusan ketenagakerjaan cukup ditangani oleh personalia, *human resources department*, atau pimpinan perusahaan itu sendiri. Anggapan seperti ini lah yang menghambat perkembangan serikat pekerja dan menurunkan efek peran dialog sosial.

Padahal, keberadaan serikat pekerja ini banyak fungsinya, di antaranya, adalah sebagai berikut: membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB), menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, mewakili pekerja di lembaga yang terkait dengan urusan perburuhan, membela hak dan kepentingan anggotanya, menyalurkan aspirasi secara demokratis, memajukan perusahaan dan menyejahterakan pekerja beserta keluarganya. Konsekuensi logis dari ketiadaannya ini, kepedulian terhadap tugas dan fungsi tersebut rendah, sehingga keputusan-keputusan

sepihak pengusaha yang kurang memberikan keadilan terhadap pekerja sering menyulut konflik hingga tindakan anarki.

Pada beberapa kasus pekerja di Bali yang protes atas ketidakadilan di lingkungan kerjanya sering terjadi dan dilakukan sendiri-sendiri tanpa melalui serikat pekerja. Mereka dikucilkan, diintimidasi, dan ada yang dipecat tanpa pesangon tanpa ada pembelaan yang berarti dari siapapun. Meskipun jumlah pekerja yang bersengketa berakhir dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh pengusaha di Provinsi Bali tahun 2011-2012 ini kecil, tercatat sebanyak 13 kasus dan terselesaikan sebanyak 7 kasus (Prajarani, 2011). Untuk menghadapi permasalahan pekerja dan pengusaha seperti itu diperlukan wadah yang memiliki legalitas dan dilindungi hukum melakukan tugas dan fungsinya secara profesional tanpa ada keberpihakan. Inilah di antara pentingnya efek peran aktif pekerja dalam dialog sosial.

### Efek Kerja Layak di Industri Pariwisata

Pada kerja layak ini dapat mendorong perkembangan industri pariwisata Bali yang terlihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2012 tersebut. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini juga mampu membawa efek terhadap peningkatan jumlah pendapatan. Gambaran seperti itu dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4  
Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Pendapatan di Lokasi Penelitian, 2008-2012

No	Tahun	Kedonganan		Jimbaran	
		Wisatawan	Pendapatan (Rp.000,000)	Wisatawan	Pendapatan (Rp. 000,000)
1	2008	1.093.403	585.143	1.125.680	1.230.817
2	2009	1.471.939	883.016	1.538.057	1.681.710
3	2010	1.718.170	1.138.611	1.801.843	1.970.119
4	2011	1.931.928	1.428.697	1.970.135	2.154.130
5	2012	2.031.243	1.599.062	2.417.674	2.643.486
Jumlah		8.246.683	5.634.529	8.853.389	9.680.262

Sumber: Arsip Kelurahan Kedonganan-Jimbaran, 2013

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang juga mengakibatkan peningkatan pendapatan di berbagai jenis usaha di industri

pariwisata ini menarik investor untuk terus menanamkan modalnya di Kedonganan-Jimbaran Bali. Selama jangka waktu 6 bulan

mulai dari Januari sampai Juni tahun 2013, nilai investasi di Kedonganan sebesar 35,8 Miliar dan Jimbaran 359,25 Miliar cukup

fantastis untuk sebuah desa yang sulit dicari padanannya. Besaran nilai investasi setiap tahun bisa dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5  
Nilai Investasi dari Tingkat Kunjungan dan Pendapatan Wisatawan di Lokasi Penelitian dari Januari-Juni 2013

No	Bulan	Lokasi	
		Kedonganan	Jimbaran
1.	Januari	150.000.000	153.000.000.000
2.	Februari	200.000.000	500.000.000
3.	Maret	33.000.000.000	350.000.000
4.	April	100.000.000	400.000.000
5.	Mei	2.000.000.000	205.000.000.000
6.	Juni	350.000.000	-
Jumlah		35.800.000.000	359.250.000.000

Sumber: Arsip Kelurahan Kedonganan-Jimbaran, 2013

Selain itu, kenyataan empirik sebagai bukti nyata bahwa pariwisata yang di gadang-gadang mampu menjadi obat generik yang mampu menyejahterakan (Dale, 2013; Damanik, 2013) melalui efek kerja layak di industri pariwisata ini terlihat sekali kontribusinya, seperti (1) besaran gaji atau upah layak yang dibutuhkan; (2) jam kerja yang diberlakukan; (3) pola hubungan kerja yang ditumbuhkan; (4) jaminan sosial tenaga kerja yang diterima; dan (5) kebebasan

berserikat yang dimiliki. Kerja layak pada aspek-aspek ini terbukti signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan para pekerja karena mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kenyataan empiris ini juga menunjukkan bahwa pekerja tidak semakin melarat, tetapi sebaliknya semakin menyejahterakan. Tabel 6 berikut dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang efek kerja layak terhadap upaya pencapaian kesejahteraan seperti itu.

Tabel 6  
Efek Kerja Layak Berbasis Kesejahteraan Pekerja

No	Indikator Kerja Layak Berbasis Kesejahteraan	Persentase Efek Kerja Layak Berbasis Kesejahteraan Pekerja				
		Sangat baik	Baik	Kurang baik	Tidak baik	Sangat tidak baik
1.	Gaji	46,8	22,7	11,5	10,0	9,0
2.	Hubungan Kerja	47,1	30,4	13,8	7,1	1,6
3.	Jam Kerja	17,9	36,5	24,4	19,8	1,4
4.	Jamsostek	39,4	19,3	13,3	26,6	1,4
5.	Kebebasan Berserikat	25,0	14,4	5,2	4,3	51,1

Sumber: Data primer, 2013

Sekurang-kurangnya seperti itulah gambaran mendalam tentang efek kerja layak terhadap pekerja pariwisata secara keseluruhan. Kenyataan empirik ini membuktikan bila kerja layak mampu mewujudkan harapan terjadinya kesejahteraan ekonomi dalam industri pariwisata. Begitu juga sebaliknya, industri pariwisata juga mampu membawa

peningkatan kesejahteraan bagi para pelaku usaha khususnya pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Gambar 1 berikut dapat memberi kemudahan dalam memahami efek keseluruhan dari kerja layak terhadap perkembangan industri pariwisata yang telah mampu mewujudkan pencapaian kesejahteraan atau dalam bahasa Bali disebut *yastra jagaditha*.

No	Efek Kerja layak	Capaian Kesejahteraan	%	Efek terhadap Industri Pariwisata
1.	Terhadap Pekerja	<b>Tinggi</b> (upah layak, kerja 40 jam/ minggu, nondiskriminasi, noneksploitatif, setara, mutualisma, dan humanis)	55,4	Pariwisata produktif
2.	Terhadap Pengusaha	<b>Tinggi</b> (kerja harmonis, produktif, menguntungkan)	75	Pariwisata Terbuka, dinamis, dan saling menguntungkan
3.	Terhadap Pemerintah	<b>Tinggi</b> (pendapatan pajak meningkat)	55	Pariwisata melindungi, adil, dan demokratis
Kesimpulan		Mengayomi dalam kesejahteraan	-	Pariwisata Kesejahteraan

Gambar 1  
Capaian Kerja Layak di Industri Pariwisata

Sumber: Olahan data, 2013

Pertumbuhan industri pariwisata yang seperti itu sekaligus juga mendudukkan bahwa kajian Mumi (2005), Cukier dan Wall (1995), serta Williams dan Shaw (1988) yang menyatakan pekerja pariwisata tidak berkontribusi secara signifikan untuk bisnis masyarakat karena pariwisata adalah industri dengan perekrutan kerja berkualifikasi rendah, bersifat tidak profesional, dan berupah murah, sepenuhnya telah bertentangan dengan kenyataan empiris di lokasi penelitian Kedonganan-Jimbaran, Bali. Berdasarkan kenyataan itu, industri pariwisata justru mampu menumbuhkan jenis-jenis usaha baru di kalangan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Pendapat yang lain juga dijumpai dalam temuan UNWTO (2009) dan penelitian Thomas (1980) yang menyimpulkan bila masifnya kesempatan kerja di industri pariwisata hampir tidak selalu paralel dengan kesejahteraannya. Pandapat ini, sekiranya juga sudah tidak relevan apabila disandingkan dengan kenyataan empiris di lokasi penelitian. Deskripsi efek kerja layak terhadap pekerja di industri pariwisata terbukti mendorong lahirnya kesejahteraan pekerja dan pengusaha secara bersama-sama, walaupun pencapaian tersebut belum dapat merata di seluruh aspek yang dibutuhkan oleh pekerja. Oleh karena itu, kesimpulan pandangan tersebut perlu untuk disesuaikan kembali dengan perkembangan industri pariwisata kekinian agar kerelevansiannya

dapat teruji. Kendati demikian, hasil studi sebelumnya di antaranya Williams dan Shaw (1988), serta Thomas (1980) sangat memiliki peran yang berharga dalam studi ini karena dapat diketahui bila industri ini pernah dibangun di atas pondasi yang tidak profesional, berkualitas rendah, berupah murah, dan tidak menyejahterakan. Dengan begitu, hasil analisis penelitian ini, mampu menunjukkan bila industri pariwisata telah banyak berubah dan membawa perubahan, baik dalam hal profesionalitas, kinerja, upah, maupun kesejahteraan yang ditimbulkan, dan hasil studi Williams dan Shaw (1988), serta Thomas (1980) merupakan pembandingan yang sangat berharga untuk itu semua.

Kenyataan empirik seperti ini bukan hanya nyata dalam lokasi penelitian, tetapi juga telah menjadi kebutuhan yang signifikan pada destinasi-destinasi penting di Bali. Beberapa penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa industri pariwisata cenderung tidak ekonomis, (Sudemen, 2009), berorientasi keuntungan, (Tardanico, 2003), dan tidak selalu paralel dengan kesejahteraannya (Thomas, 1980), seyogyanya diverifikasi ulang dengan konteks kekinian yang telah banyak berubah. Industri pariwisata sekarang lebih bersifat terbuka, dapat diandalkan dan bernilai strategis untuk pencapaian kesejahteraan, seperti yang dikatakan Rodgers (2001), Crouch dan Ritchie (1999), Dwyer dan Forsyth (1998), dan Perez-Lopez (1993). Keseluruhan deskripsi

sebelumnya merupakan kenyataan empiris yang menguatkan argumentasi di dalamnya. Industri pariwisata sekarang dapat diandalkan sebagai industri yang menjamin kesejahteraan atau *yastra jagaditha*, asalkan prinsip-prinsip kerja layak dalam penelitian ini mampu diimplementasikan secara optimal.

## SIMPULAN

Efek kerja layak sebesar 68% telah mampu menumbuhkan keseimbangan antara produktivitas, menumbuhkan iklim kerja yang demokratis, menyejahterakan dan menempatkan pekerja sebagai makhluk sosial bukan semata-mata sebagai alat kapital, tetapi telah menjadi bagian dari pelaku kapital. Semakin tinggi efek variabel-variabel kesempatan kerja penuh dan produktif, pemenuhan kebutuhan hak-hak pekerja, perlindungan pekerja terhadap jaminan sosial, dan peran aktif pekerja dalam dialog sosial baik secara simultan maupun parsial dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan industri pariwisata yang menyejahterakan. Efek secara simultan maupun parsial dari variabel-variabel yang diilustrasikan dalam kerja layak tersebut, bila dilakukan dengan baik mampu menyejahterakan pekerja, pengusaha, dan pemerintah secara demokratis serta berkontribusi terhadap pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, menyadari penguatan terhadap efek secara simultan maupun parsial dari nilai-nilai variabel kerja layak kepada semua pihak dalam mempraktikkan kerja layak di berbagai jenis usaha di industri pariwisata sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, produktivitas industri, dan peningkatan pendapatan pajak Negara. Begitu juga peningkatan pengawasan dan dukungan kebijakan pemerintah yang mengacu pada terlaksananya praktik variabel-variabel kerja layak tersebut sangat diperlukan untuk mendukung tujuan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Anker, R. 2002. People's Security Surveys: An Outline of Methodology and

Concepts. *International Labour Review*. 141(4): 309–329.

Anker, R., I.Chernyshev, P.Egger, F.Mehran, dan J.Ritter. 2003. Decent Work With Statistical Indicators. *International Labour Review*. 142(2): 147–177.

Austin, T. 1991. A Chance to Be Decent: Northern Territory Half Caste Girls in Service in South Australia. *Labour History*. 60.(1): 51–65.

Chen, M., J.Vanek, dan M.Carr. 2004. *Mainstreaming Informal Employment and Gender In Poverty Reduction*. Commonwealth Secretariat. London.

Crouch, G.I., dan Ritchie, J.R. 1999. Tourism, Competitiveness and Societal Prosperity. *Journal of Business Research*. 44 (2): 137–152.

Cukier, J., dan Wall, G. 1995. Tourism Employment in Bali. *Tourism Economics*. 1(4): 389–401.

Damanik, J. 2013. *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali). 2012. *Data Informasi Ketenagakerjaan Provinsi Bali*.

Dwyer, L. dan Forsyth, P. 1998. Estimating The Employment Impacts of Tourism on a Nation. *Tourism Recreation Research*. 23 (2).67--83

Hill, H. 2001. Small and Medium Enterprises in Indonesia: Old Policy Challenges for a New Administration. *Asian Survey*. 41(2): 248-270.

ILO. 1999. *Decent Work: Report of the Director-General, International Labour Conference, 87<sup>th</sup> Session*. ILO Publications. Geneva

ILO. 2002a. *Decent Work and the Informal Economy, Report VI, International Labour Conference, 90<sup>th</sup> Session*. ILO Publications. Geneva.

- ILO. 2009a. *Asian Decent Work Decade 2006 – 2015, Implikasi Krisis Ekonomi Global Terhadap Lapangan Kerja Bidang Pariwisata: Studi Kasus Bagi Indonesia, Proyek Peluang Kerja Kaum Muda (JOY), Desember 2009*. ILO Publications. Jakarta.
- Kantor, P., Rani, U, dan Unni, J. 2006. Decent Work Deficits in Informal Economy: Case of Surat. *Ec. and Pol. Weekly*. 41(21): 2089 – 2097.
- Marx, K. 2006. *Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik*, Buku I, II, III. Hasta Mitra Ultimus & Institute for Global Justice. Jakarta.
- Mumi, Y.I. 2005. *Gerakan Sosial Pekerja Hotel di Kabupaten Badung Pasca-2005: Perspektif Kajian Budaya*, Dr., Disertasi: UNUD.
- Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., dan Wright, P.M. 2000. *Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage*, Third Edition. McGraw-Hill Companies, Inc. USA.
- Perez-Lopez, J.F. 1993. Cuba's Thrust to Attract Foreign Investment: A Special Labor Regime for Joint Venture in International Tourism. *The University of Miami Inter-American Law Review*. 24(2): 221 – 279.
- Prajarani, M.I. 2011. SPPT Tel. Serikat Pekerja PT Tanjungen (Internet). Dialog Sosial dan Industrial Unionism Seminar. , (di akses 7 April 2012 jam 18:00 PM).
- Rodgers, G. 2001. Decent Work as a Development Objective. *Indian Journal of Labour Economics*. 44(1): 15 – 26.
- Standing, G. 2002. From People's Security Surveys to a Decent Work Index. *International Labour Review*. 141(4): 441 – 454.
- Sudemen, I.W. 2009. Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Bali. *Jurnal Sarathi*. 16(3): 394 – 421.
- Tardanico, R. 2003. Employment Transformations and Social Inequality: A Comparison of Costa Rica, Guatemala, and the Dominican Republic. *Social and Economic Studies*. 52(3): 119 – 141.
- Thomas, J.M. 1980. The Impact of Corporate Tourism on Gullah Balcks: Notes on Issue of Employment. *Phylon*. 41 (1): 1 – 11.
- UNWTO. 2009. *Sustainable Tourism Development in a Network of Cross Border Parks and Protected Areas in Benin, Burkina Faso, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Sierra Leone*. Annual Report A Year of Recovery.
- Williams, A.M. dan Shaw, G. 1988. Tourism: Candyfloss Industry or Job Generator? *The Town Planning Review*. 59(1): 81 – 103.